

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu hal yang sangat penting dan bahkan untuk akhir-akhir ini pun banyak dipelajari terutama dalam setiap keberlangsungan negara berkembang. Partisipasi politik juga dalam arti lain bahwa bentuk kegiatan dari seseorang hingga suatu kelompok yang ikut serta secara aktif dalam setiap kehidupan dan aspek politik, seperti halnya dalam berpartisipasi untuk memilih pemimpin suatu negara, dan hal itu membuat secara tidak langsung atau secara langsung bisa memengaruhi adanya suatu kebijakan dalam pemerintah (Budiardjo 2003).

Menurut Herbert McClosky dalam (Budiardjo 2003), partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka bisa mengambil bagian dalam sebuah proses pemilihan untuk penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses sebuah pembentukan kebijakan umum. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M dalam (Budiardjo 2003), partisipasi politik merupakan bentuk kegiatan dari warga yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksudkan untuk bisa memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Demikian juga partisipasi nantinya bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, dan juga secara damai atau dengan bentuk kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Konsep dari partisipasi politik ini dalam keberlangsungan demokrasi mengemukakan bahwa seperti halnya yang sudah dipaparkan sebelumnya, partisipasi menjadi sebuah kedaulatan bagi rakyat, dalam hal ini akan terlihat seperti apa toleransi yang terdapat diantara konsep partisipasi politik yang kedaulatannya ada ditangan rakyat dengan jalannya pemilihan umum, dalam konsep kedaulatan itu sendiri mengesampingkan tidak adanya suatu perbedaan atau membedakan dalam segi agama, suku, ras dan juga kelas sosial ekonomi dalam kata lain berarti mengakui persamaan hak politik dalam pemilihan umum. Masyarakat ketika dalam jalannya sebuah partisipasi politik, dalam pemilihan umum bisa bebas menentukan sebuah partai mana yang akan mereka pilih, calon mana yang pantas menurut mereka untuk bisa memimpin tanpa adanya sebuah paksaan serta rasa takut ancaman yang datang dari luar atau orang lain, maka dalam hal ini pemilih akan mendapatkan kebebasan juga terhadap segala keikutsertaan aktivitas dalam pemilihan, seperti halnya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat dan juga partai politik pendukung sekalipun, serta bisa menyaksikan atau melihat dalam hal ini transparansi perhitungan dalam penghitungan suara.

Perilaku pemilih dalam keberlangsungan pemilihan umum bisa dikatakan sangat erat kaitannya dengan bagaimana dari individu serta suatu kelompok bisa berinteraksi dalam pemilihan umum atau berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum. Individu serta kelompok juga menjadi suatu hal yang bisa sangat penting bagaimana untuk menentukan perilaku pemilih dalam kontestasi politik atau dalam pemilihan umum, terutama hal ini keterkaitannya dengan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik atau kandidat politik perorangan yang akan mereka pilih dan mereka

percaya sebagai pemimpin (Kumayas and Sumolang 2015).

Pemilihan umum merupakan sarana dalam sebuah pelaksanaan daripada kedaulatan yang berada pada tangan rakyat, dalam pemilihan umum itu sendiri masyarakat akan bisa menentukan sendiri pilihan yang ia percaya. Artinya rakyat secara penuh berkuasa untuk bagaimana mereka bisa menentukan pilihan mereka yang dipercayainya sebagai pemimpin dalam membangun sebuah kebijakan yang akan menentukan arah hidup mereka, maka dalam hal ini rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Perilaku memilih juga dalam arti lain adalah sebuah interaksi diantara kedua belah pihak antara pemerintah dan juga masyarakat, diantara lembaga-lembaga terkait dan diantara kelompok serta individu dalam masyarakat, dalam rangka pelaksanaan keputusan politik (Surbakti 2018).

Dalam keberlangsungan pemilihan umum para pemilih atau masyarakat akan berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih para wakil rakyat yang akan bisa memperjuangkan kepentingan mereka, ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi perilaku pemilih dalam keberlangsungan untuk berpartisipasi dalam pemilu, seperti yang dikemukakan oleh teori perilaku pemilih dalam mazhab *Columbia* dalam penelitiannya Paul Lazarsfeld yaitu faktor sosiologis, dimana faktor ini menyangkut bagaimana masyarakat memandang dan berperilaku terhadap kesesuaian agama yang mereka pegang, kesesuaian jenis kelamin, atau melihat dari rentang usia yang akan memimpin mereka hingga bagaimana mereka memandang terhadap pekerjaan, hal ini yang akan mempengaruhi dan menentukan pilihan politiknya dalam faktor sosiologis

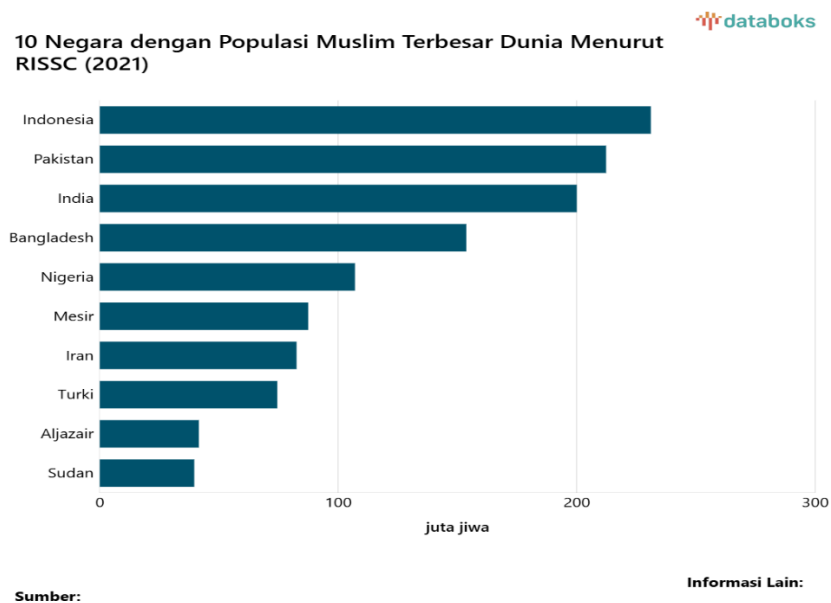
atau dalam kata lain bahwa perilaku memilih akan terbentuk dan dipengaruhi oleh kelompok sosial dan interaksi interpersonal.

Pemilu serentak yang digelar pada tahun 2024 dimana Indonesia menggelar pesta demokrasi yang dimana hal ini membuat antusiasme dari kalangan para politisi berlomba dalam usaha menggaet suara dari pemilih. Kota Tasikmalaya sendiri telah melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024 dengan berbagai dinamika politik yang terjadi didalamnya, dalam hal ini Kota Tasikmalaya sudah melaksanakan resolusi demokrasi di Negara Indonesia, ketika kita melihat dari segi geografis yang ada dalam negara Indonesia, ketika berbicara mengenai umat beragam yang ada di Indonesia ini terlihat dipisahkan oleh geografis wilayah yang berpulau-pulau, lingkungan daerah pesisir, pedalaman desa, hingga kota metropolitan. Kondisi dari beragamnya masyarakat yang ada di Indonesia seperti keragaman dalam budaya hingga agama ini akan mempengaruhi perilaku dan juga bagaimana memengaruhi sebuah pandangan dalam perilaku memilih masyarakat dalam menentukan calon pemimpin mereka (Putra 2018).

Dari beberapa keanekaragaman tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing pada setiap wilayahnya, dan salah satu yang cukup menarik terletak pada keanekaragaman budaya setempat atau biasa disebut sebagai kearifan lokal. Salah satu kebiasaan dari kearifan lokal dalam hal budaya ini yaitu perilaku dari masyarakat yang memegang nilai-nilai atau pedoman hidup yang berpegang pada keagamaan terkhusus pada Agama Islam, ini bukan tanpa alasan karena Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai penduduk dengan mayoritas masyarakatnya beragama

muslim terbesar didunia, menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* ada 231,06 juta penduduk indonesia yang menganut Agama Islam atau sebagai muslim, maka ketika melihat dari laporan tersebut dengan jumlah 231,06 juta penduduk atau setara dengan 86,7% dari total penduduk yang ada di indonesia.

Gambar 1. 1
Tingkat Populasi Muslim



Sumber : databoks.katadata.id

Ketika melihat bagaimana data yang terjadi dilapangan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim dengan jumlah yang cukup besar ini tidaklah mengherankan jika nilai-nilai dan juga pedoman hidup yang banyak diterapkan di beberapa daerah selalu terpengaruh oleh agama islam atau biasa disebut religius Islam seperti halnya ada beberapa daerah yang terkenal religius yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, serta beberapa wilayah yang terletak di pulau jawa seperti

halnya salah satu kota yang berada di Jawa Barat yaitu Kota Tasikmalaya. Penganut Agama Islam yang ada di Kota Tasikmalaya menurut BPS tahun 2024 yang diperbarui pada 1 Maret tahun 2024, jumlah penganut Agama Islam di Kota Tasikmalaya ini sekitar 98% atau sekitar 712.034 ribu jiwa dari total penduduk, ditambah dengan faktor pendukung bahwa di Kota Tasikmalaya dikenal dengan sebutan sebagai kota santri karena banyaknya pondok pesantren yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya.

Tabel 1. 1
Tabel Penduduk Beragama Islam Kota Tasikmalaya

Wilayah Jawa Barat	Penduduk Beragama Islam	
	2022	2023
Kota Tasikmalaya	736.057	747.123

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Dibalik sebutanya sebagai kota santri, Kota Tasikmalaya itu sendiri mempunyai sebuah visi dan misi yang juga mengarah pada hal yang agamis yakni “Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju dan Madani”, serta khusus pada poin pertama dalam misi yaitu *mewujudkan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius dan Berkearifan Lokal* (Ikhsandi, Yuningsih, and Akbar 2022).

Dalam setiap keberlangsungan kontestasi politik yang ada di Kota Tasikmalaya dan menentukan bagaimana calon pemimpin yang pantas untuk memimpin, masyarakat seolah selalu berpedoman terhadap nilai agama yang mereka bawa, berpegang teguh terhadap nilai-nilai agama yang mereka terapkan dalam kehidupan

sosial dan juga pada pandangan politik mereka. Mayoritas masyarakat yang beragama Islam ketika mereka dihadapkan dengan kontestasi politik yang menentukan calon pemimpin, seperti halnya dalam pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota, dan juga dalam pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD), masyarakat yang memang akan seringkali berpegang teguh terhadap nilai-nilai keislaman dan akan cenderung selektif dalam memilih.

Kecamatan kawalu dan mangkubumi yang berada dalam wilayah kota Tasikmalaya, menjadi salah satu kecamatan yang turut melaksanakan Pemilihan Umum dan juga Pemilihan Anggota Legislatif pada Tahun 2024. Dua kecamatan dalam dapil IV ini juga menjadi salah satu wilayah yang didalamnya terdapat beberapa pesantren yang menjadi pusat pembelajaran Agama Islam bagi beberapa wilayah yang ada di sekitar Kota Tasikmalaya, banyak pesantren yang berkembang didalamnya menjadikan masyarakat mendapatkan pembelajaran nilai-nilai agama dalam kehidupannya, hal ini yang menjadi salah satu faktor juga ketika keberlangsungan hidup dari masyarakat yang terkhusus berada di wilayah dapil IV yang seolah nilai agama akan terus membersamai mereka sesuai apa yang mereka pelajari baik itu dalam keberlangsungan hidup sosial mereka dan bahkan dalam pandangan politik sekalipun, ini juga menjadikan suatu ciri yang cukup jelas bahwa Kota Tasikmalaya mendapatkan sebutan sebagai kota santri dengan banyaknya pusat pendidikan Islam atau pesantren yang tersebar diberbagai wilayah yang ada dan salah satunya di Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi.

Selain dengan terkenal sebagai kota santri, Kota Tasikmalaya juga dalam keberlangsungan pemilu tahun 2024 kemarin terdapat fenomena yang unik dan menarik, dimana pada pelaksanaannya ada sebuah peningkatan keterwakilan Perempuan dalam ranah pemilihan legislatif, hal ini ada peningkatan dari beberapa edisi pemilu sebelumnya seperti pada pemilu tahun 2019 yang hanya mendapati keterwakilan Perempuan 3 orang yang berhasil maju dan berkontestasi dalam pemilu sedangkan pada tahun pemilu di 2024 ini Kota Tasikmalaya mempunyai 7 orang yang berhasil maju dan berkontestasi dalam pemilihan umum, terutama dalam legislatif dari kalangan perempuan, ini menjadi suatu hal yang positif dalam keberlangsungan kehidupan pemilihan umum di Kota Tasikmalaya, dibalik hal itu sebenarnya ada target dalam pemilihan umum ketika berbicara mengenai keterwakilan dari kaum perempuan untuk maju dan mengisi kursi di keanggotaan legislatif, pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 245 ayat (2), sebenarnya sudah tertera bahwa parpol wajib menyertakan keterwakilan dari kaum Perempuan seminimal minimalnya 30% dalam daftar calon anggota legislatif untuk setiap daerah pemilihan, mungkin secara umum Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kuota 30% tersebut karena hanya bisa melanggengkan 7 orang keterwakilan Perempuan, akan tetapi untuk dapil IV Ketika melihat dari segi perwakilan dari tiap dapilnya, dapil IV menjadi penyumbang keterwakilan dari kaum Perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif ditingkat lokal dengan jumlah 3 orang.

Kota Tasikmalaya yang merupakan pemegang teguh nilai-nilai agama dalam masyarakatnya hampir disetiap aspek setiap kehidupan mereka, bahkan dalam segi

memilih pemimpin bagi mereka, karena pada dasarnya mereka masih menganggap bahwa laki-laki lebih layak untuk menjadi seorang pemimpin dibandingkan dengan perempuan, bukan tanpa alasan hal ini muncul, memang dalam Agama Islam tidak spesifik lebih menjuruskan bahwa laki-laki akan selalu diatas dalam hal kepemimpinan dan perempuan akan selalu menjadi pelayan bagi laki-laki atau suaminya, dengan arti lain bahwa perempuan akan selalu menjaga urusan rumah tangga dibandingkan dengan menjadi seorang pemimpin, stereotif ini seakan tetap bertahan dalam pemikiran masyarakat, terlebih daripada itu negara Indonesia masih banyak masyarakatnya yang masih bergelut dengan sistem patriarki dan bukan tidak mungkin Kota Tasikmalaya pun demikian, apalagi dengan predikat sebagai kota santri dan juga agam mayoritasnya adalah islam atau sebagai muslim, dengan demikian masyarakat yang masih teguh memegang nilai-nilai agama mereka dan memproyeksikanya dalam kehidupan mereka.

Dari beberapa penjelasan yang telah dilakukan, faktor sosiologis tidak luput dari faktor yang bisa mempengaruhi perilaku dari pemilih dalam pemilihan umum, selain dari beberapa faktor psikologis dan rasional yang memandang untung ruginya terhadap kehidupan mereka dan keterkaitan mereka terhadap kandidat dan parpol yang mereka pilih.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang hubungan faktor sosiologis dan faktor psikologis terhadap perilaku memilih masyarakat pada pemilihan kepala daerah pelalawan tahun 2025 di Kecamatan Bandar Lampung (Purba 2017), ditemukan bahwa faktor dari sosiologis dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap membentuk perilaku memilih masyarakat terutama dalam

pemilihan kepala daerah di Bandar Lampung pada tahun 2025. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa aspek yang ada dalam faktor sosiologis terhadap perilaku memilih masih relevan dan sesuai dengan sebuah perilaku memilih yang ditunjukkan oleh masyarakat.

Pada penelitian mengenai pengaruh pilihan sosiologis terhadap perilaku memilih masyarakat kecamatan kalideres jakarta barat pada pilkada DKI Jakarta 2017 (Papilaya and Rahmawati 2017), ditemukan bahwa faktor sosiologis memang mempunyai hasil yang positif terhadap membentuk sebuah perilaku memilih dari masyarakat, tetapi tidak semua indikator yang terdapat dalam faktor sosiologis bisa mempengaruhi perilaku memilih, indikator agama menjadi yang paling tinggi terhadap perilaku memilih dari masyarakat Kalideres Jakarta Barat di pilkada dki jakarta tahun 2017, dan indikator etnis tidak menjadi suatu hal yang paling signifikan dalam perilaku memilih didalam masyarakat terhadap keberlangsungan pilkada DKI Jakarta.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak semua indikator dalam faktor sosiologis berpengaruh secara signifikan dalam melihat perilaku memilih di masyarakat, akan tetapi indikator agama yang memang menjadi pusat perhatian masyarakat ketika mereka dihadapkan dengan sebuah kontestasi politik seperti halnya pilkada ataupun pemilu, karena pada dasarnya masyarakat beranggapa agama seolah sebagai jendela untuk bisa melihat dan memaknai setiap hal dalam mereka hidup.

Penelitian ini akan menggali bagaimana perilaku memilih dari masyarakat dapil IV di Kota Tasikmalaya dalam pemilihan umum tahun 2024 dari pendekatan sosiologis dengan pertimbangan dari sebuah fenomena keterwakilan Perempuan yang meningkat

serta Kota Tasikmalaya yang merupakan kota santri, yang dimana setiap hal dalam kehidupan bermasyarakatnya akan tertuju pada nilai-nilai agama yang mereka pegang, dan hal ini juga menjadi indikator sosiologis yang kuat pada pemilu tahun 2024 di dapil IV Kota Tasikmalaya.

Dari uraian diatas, maka penulis mengajukan judul penelitian **“Pengaruh Faktor Sosiologis terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Dapil IV Kota Tasikmalaya dalam Pemilu 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

Seberapa besar pengaruh faktor sosiologis terhadap perilaku memilih masyarakat pada pemilu tahun 2024 di dapil IV kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor sosiologis terhadap perilaku memilih masyarakat pada pemilu tahun 2024 di dapil IV kota Tasikmalaya ?

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada masyarakat daerah pemilihan 4, yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku memilih masyarakat dapil IV dalam pemilu tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan penambahan dalam sebuah wawasan dan juga pengetahuan mengenai perilaku pemilih, selain itu juga penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi Ilmu Politik khususnya dalam hal yang berkaitan dengan analisis terhadap perilaku pemilih.

1.5.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi dasar atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh berbagai faktor sosial terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan umum terkhususnya di tingkat lokal.